



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 57 Banyuwangi 68416  
Telepon (0333) 412343 Faksimile (0333) 412343  
Pos-el [dppmptsp\\_bwi@banyuwangikab.go.id](mailto:dppmptsp_bwi@banyuwangikab.go.id)  
Laman [www.dppmptspbwi.banyuwangikab.go.id](http://www.dppmptspbwi.banyuwangikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024. Laporan ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Akhirnya segala kritik dan saran sangat tetap diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 ini dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Kami berharap semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Perangkat Daerah dan masyarakat selaku penerima layanan.

Banyuwangi, 12 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M. Si

Pembina

NIP 19720120 199403 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah” dan Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah” yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30% (Sangat Rendah : Skala Kriteria Penilaian) dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 94,54% (Baik Sekali : Skala Kriteria Penilaian).
2. Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Awal Tahun atau sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2024 sebesar Rp. 9.183.944.128,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 9.333.938.678,- atau ada tambahan anggaran sebesar Rp. 149.994.550,-;
3. Capaian Kinerja Anggaran (Realisasi Anggaran) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), yaitu sebesar Rp. 9.333.938.678,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.253.603.391,- atau sebesar 88,43% (Baik: Skala Kriteria Penilaian);
4. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi pada Capaian Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30 (Tidak Efektif) dan sebesar 158,75% (Tidak Efisien) sedangkan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah sebesar 94,54 (Tidak Efektif) dan sebesar -8,12% (Efisien).

Demikian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024, semoga bermanfaat bagi semua komponen yang berkontribusi atas pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai pemicu untuk mencapai target kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....	2
Landasan Hukum Keorganisasian .....	2
1.3 Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II .....	6
PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.1.1 Visi Organisasi .....	6
2.1.2 Misi Organisasi .....	6
2.1.3 Tujuan Organisasi .....	7
2.1.4 Sasaran Strategis Organisasi .....	7
2.1.5 Perjanjian Kinerja (PK) .....	8
2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dan Anggaran .....	10
BAB III .....	12
AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	12
3.1.1 Pengukuran Kinerja .....	12
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	13
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD.....	14
3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Provinsi.....	15
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja .....	31
3.1.6 Upaya Perbaikan Kinerja .....	33
3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	22
3.1.8 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	16
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	26
3.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi .....	34
BAB IV .....	36
PENUTUP .....	38
4.1 Kesimpulan .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	7
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	8
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.....	9
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat.....	11
Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.....	12
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.....	13
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Provinsi.....	13
Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 .....	16
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 .....	17
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2024 .....	20
Tabel 3.10 Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 .....	23
Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi .....	3
---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

## 1.2 Penjelasan Umum Organisasi

### Landasan Hukum Keorganisasian

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- f. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok di atas, juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

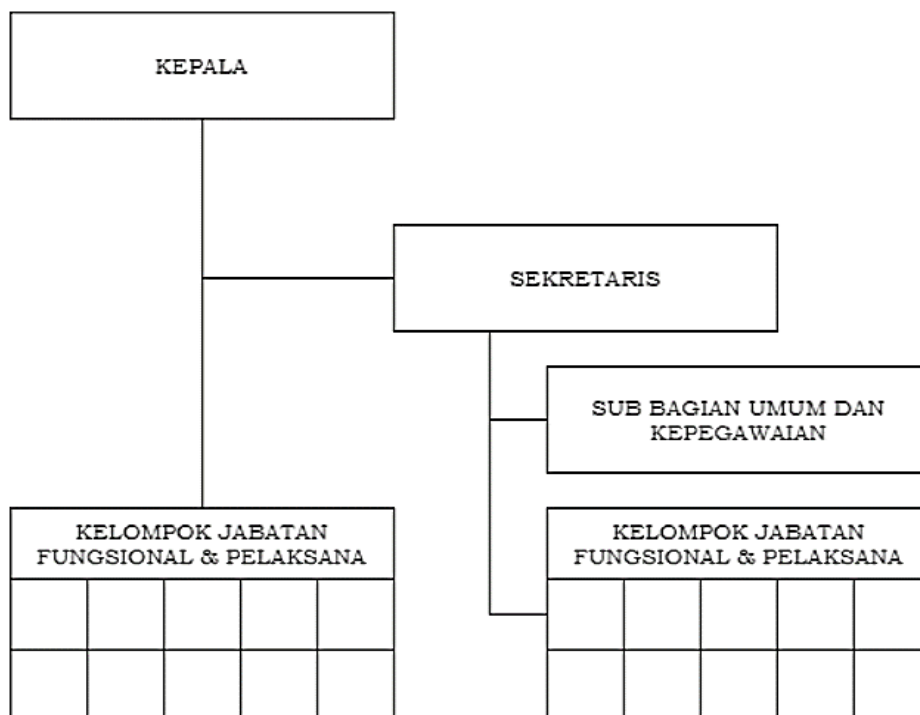
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi**



### 1.3 Isu Strategis

Berdasarkan uraian Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan serta Peran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah maka Isu Strategis (*Strategic Issued*) yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan antara lain:

- a. Laju Pertumbuhan Investasi belum optimal dan mengalami penurunan;
- b. Nilai realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negera (PMDN) belum optimal dan tidak memenuhi target yang ditetapkan.
- c. Kinerja terhadap Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang harus ditingkatkan

### 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Latar Belakang menguraikan mengenai latar belakang pembuatan laporan serta gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

#### 1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Penjelasan Umum Organisasi menjelaskan mengenai landasan hukum keorganisasian, susunan, tugas dan fungsi serta pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

#### 1.3 Isu Strategis

Pada sub bab Isu Strategis menjelaskan permasalahan utama (*strategic issued*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta susunan garis besar isi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## BAB II : PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Pada sub bab ini diuraikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Organisasi, Perjanjian Kinerja serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Anggaran.

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan upaya perbaikan kinerja.

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini disajikan tabel capaian kinerja keuangan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta menguraikan upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan agar capaian kinerja keuangan mencapai hasil yang optimal.

### 3.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Pada sub bab ini menguraikan analisis efektivitas dan efisiensi anggaran untuk mengetahui penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan.

## BAB IV : PENUTUP

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

##### **2.1.1 Visi Organisasi**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RJMD) Perubahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah”

Makna dari Visi Pembangunan “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat positif oleh Masyarakat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

##### **2.1.2 Misi Organisasi**

Telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sebagai wujud Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih akan memberikan Gambaran Peran dan Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Misi Kabupaten Banyuwangi, yakni:

- a. Misi Kepala Daerah Nomor 1, yaitu ”Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”

atau Misi Pembangunan Nomor 1, yaitu “Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang Mampu Mengungkit Produktifitas Sektor Unggulan dan Memperkuat Ketahanan Lingkungan.”

- b. Misi Kepala Daerah Nomor 5 yaitu: “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.” atau Misi Pembangunan Nomor 3, yaitu “Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.”

### 2.1.3 Tujuan Organisasi

Dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Tujuan “Laju Pertumbuhan Investasi”.

### 2.1.4 Sasaran Strategis Organisasi

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu “Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”.

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD		
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Indikator Sasaran Strategis, Formulasi serta Target Indikator Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Indikator Sasaran Strategis**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Investasi	-	-	(jumlah Investasi tahun N - jumlah Investasi tahun N-1) ----- x100%  jumlah Investasi tahun N-1  (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.	-	-	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran (Rp. Triliun)	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00

### 2.1.5 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML	
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)													4,00	4,00
2.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)			1,20			1,20			1,20				1,20	4,80

NO.	PROGRAM PD	ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000,-	0,-	APBD
2.	Promosi Penanaman Modal	199.991.200,-	199.991.200,-	APBD
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.916.400,-	19.516.400,-	APBD
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.135.069.078,-	8.334.063.078,-	APBD
5.	Pelayanan Penanaman Modal	726.968.000,-	780.368.000,-	APBD
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.999.450,-	0,-	APBD
JUMLAH		9.183.944.128,-	9.333.938.678,-	

## 2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dan Anggaran

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi**  
**Tahun 2024**

RENCANA KINERJA TAHUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	4,00
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,80

TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM PD	ANGGARAN (Rp.)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	1. <b>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	50.000.000,-	0,-
		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000,-	0,-
		2. <b>Promosi Penanaman Modal</b>	199.991.200,-	199.991.200,-
		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	199.991.200,-	199.991.200,-
		3. <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	51.916.400,-	19.516.400,-
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.916.400,-	19.516.400,-
		4. <b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	19.999.450,-	0,-
		- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.450,-	0,-
		1. <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	8.135.069.078,-	8.334.063.078,-

		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.019.700	12.645.300
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.103.398.796	4.098.016.796
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.433.597.100	2.308.645.600
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.872.600	75.641.500
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.329.882	1.230.329.882
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.851.000	608.784.000
		<b>2. Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>726.968.000,-</b>	<b>780.368.000,-</b>
		- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	726.968.000,-	780.368.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>9.183.944.128,-</b>	<b>9.333.938.678,-</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Akuntabilitas Kinerja

##### 3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran serta Tingkat Pencapaian masing-masing Program dan Kegiatan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga menginformasikan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dilakukan dengan membuat Rata-Rata atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024**

NO.	PERJANJIAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	4,00	-7,17	-179,30
2.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,80	4,53	94,54

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30%. Adapun Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 94,54%.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi**

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	3,80	115,60	3042,28	4,00	44,80	1120,00	<b>4,00</b>	<b>-7,17</b>	<b>-179,30</b>
2.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,60	3,73	81,09	4,70	4,88	103,82	<b>4,80</b>	<b>4,53</b>	<b>94,54</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	-	-	-	7,00	7,00	100,00	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	%	4,00	2,67	66,67	4,50	4,50	100,00	<b>5,00</b>	<b>4,30</b>	<b>86,00</b>

3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM	%	60,00	56,00	93,33	65,00	55,00	84,62	70,00	68,00	97,14
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,50	95,50	100,00	96,00	96,00	100,00	96,50	96,50	100,00
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	95,00	85,45	89,95	96,00	98,00	102,08	97,00	96,35	99,33
6.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	95,00	96,11	101,17	95,50	95,50	100,00	96,00	96,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal dibandingkan dengan kinerja pada dua tahun terakhir selalu tercapai 100%. Sedangkan kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Masih Belum Optimal Atau Tidak Mencapai Target Yang Ditentukan, Hal Ini Dapat Dikarenakan Adanya Faktor Keterbatasan Sdm Dan Kapasitas Kelembagaan, Banyak Pelaku Usaha Belum Atau Tidak Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal Secara Berkala (Melalui Lkpm) Dan Belum Meratanya Sosialisasi Terkait Kewajiban Pelaporan Dan Pengendalian Investasi. Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Juga Belum Memenuhi Target Kinerja Hal Ini Dikarenakan Terdapat Mutasi Pegawai, Sehingga Pagu Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan Asn Tidak Dapat Dicairkan Secara Maksimal.

### 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA DALAM RENSTRA (2021-2026)	KETERANGAN CAPAIAN
1.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,53	5,00	90,60%

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa Perbandingan antara Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 dan target kinerja dalam Renstra (2021-2026) adalah sebesar 90,60%, dengan demikian akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja DPMPTSP lebih baik pada tahun mendatang antara lain dengan meningkatkan promosi investasi yang terarah dan berbasis potensi lokal, memperkuat kemitraan dengan investor melalui forum investasi daerah, serta memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam pelayanan perizinan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong percepatan realisasi investasi.

### 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Provinsi

Terdapat target kinerja Provinsi Provinsi Jawa Timur pada Sasaran Strategis Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Provinsi**

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET RENTRA (2024)			TARGET PROVINSI (2024)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,80	4,53	94,54	115,00	147,32	128,10

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Banyuwangi mencapai 94,54% dari target yang ditetapkan. Angka ini masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur yang berhasil mencapai 128,10%, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam optimalisasi realisasi investasi di tingkat kabupaten. Upaya Perbaikan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi:

1. Peningkatan Promosi Investasi yang Terarah: Menyusun strategi promosi berbasis potensi lokal dengan pendekatan digital marketing dan kerja sama lintas sektor, termasuk pemanfaatan media sosial, pameran investasi, dan business matching.

2. Penyederhanaan dan Digitalisasi Proses Perizinan: Mengoptimalkan pelayanan berbasis digital di Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam proses perizinan bagi calon investor.
3. Pendampingan dan Fasilitasi Investasi Secara Proaktif: Membentuk tim task force investasi yang bertugas mendampingi investor mulai dari tahap minat hingga realisasi, serta membantu menyelesaikan hambatan teknis di lapangan.
4. Penguatan Kolaborasi dengan OPD Terkait dan Pemerintah Desa: Mendorong sinergi lintas sektor dan pemetaan potensi investasi hingga ke tingkat desa untuk memperluas sebaran dan sektor investasi.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi triwulan atas capaian realisasi investasi serta menindaklanjuti kendala dan peluang dengan data yang terukur dan terintegrasi.

### 3.1.5 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Capaian pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah, maupun Sasaran Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024**

NO.	URAIAN PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>	%	97	96,35	99,33
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</b>	Dokumen	15	15	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	7	7	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	100,00
5.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun</b>	%	100	100	100,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	Bulan	12	12	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100,00
<b>5.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>97,32</b>	<b>97,33</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen	12	12	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	48	48	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	33	33	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	32633	30724	94,15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	1	1	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	Bulan	12	12	100,00
<b>5.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Lainnya yang Diadakan	Unit	8	8	100,00
<b>5.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Bulan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan	OB	288	288	100,00
<b>5.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara</b>	%	<b>100</b>	<b>102,31</b>	<b>102,31</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	54	59	109,26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	71	71	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dilakukan	Paket	1	1	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Jenis	122	122	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</b>	%	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	0
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Minat Investasi</b>	%	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP</b>	%	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP</b>	<b>Dokumen</b>	<b>11000</b>	<b>43486</b>	<b>395,33</b>
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bulan	12	12	100,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM</b>	%	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>97,14</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	%	<b>100</b>	<b>43,23</b>	<b>43,23</b>
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan	7	3	42,85
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan	Kegiatan	520	200	38,46
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Penanaman Modal</b>	%	<b>96,50</b>	<b>96,50</b>	<b>100</b>
<b>6.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Waktu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Bulan	12	12	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan besaran presentase capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebesar **99,33%** (sudah optimal) terdiri dari:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00% (sudah optimal) terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (capaian kinerja sebesar 100,00%), telah maksimal karena telah menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (capaian kinerja sebesar 100,00%), telah maksimal karena telah menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai target yang telah ditentukan.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (capaian kinerja sebesar 100,00%), telah maksimal karena telah melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sesuai target yang telah ditentukan.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (capaian kinerja sebesar 100,00%). Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai target yang ditentukan.
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 97,33% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (capaian kinerja sebesar 100,00%) maksimal pada penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 komponen.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (capaian kinerja sebesar 100,00%) kinerja maksimal telah merealisasikan 48 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (capaian kinerja sebesar 100,00%) kinerja maksimal telah merealisasikan 33 jenis Peralatan Rumah Tangga.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (capaian kinerja sebesar 100,00%) telah merealisasikan Bahan Logistik Kantor antara lain bahan bakar minyak kantor, air galon dan makanan dan minuman untuk petugas layanan selama 12 bulan sesuai target.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (capaian kinerja sebesar 94,15%), belum maksimal dikarenakan terdapat kebijakan penggunaan sistem digital dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga realisasi barang cetak dan penggandaan tidak maksimal. Upaya perbaikan kinerja berupa

- perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal dalam realisasi Bahan Bacaan sebanyak satu jenis dalam satu tahun anggaran.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal dalam realisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah maupun Luar Daerah selama satu tahun anggaran.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (capaian kinerja sebesar 100,00%), telah maksimal realisasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 8 unit.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (capaian kinerja sebesar 100,00%) maksimal pada realisasi Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya selama 12 bulan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi Jasa Pelayanan Umum Perkantoran atau jasa tenaga harian lepas selama 12 bulan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 102,31% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (capaian kinerja 10,,26%), pencapaian diatas target karena terdapat penambahan unit kendaraan yang dipelihara.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi 71 jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi 1 paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi 122 jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**, karena telah membuat kebijakan mengenai perizinan dan non perizinan dalam satu tahun anggaran. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:
  - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 0,00%, dikarenakan pengalihan anggaran pada perogram prioritas, sehingga tidak dapat merealisasikan Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (capaian kinerja sebesar 0,00%), dikarenakan pengalihan anggaran pada perogram prioritas, sehingga tidak dapat merealisasikan penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar **100,00%** terdiri dari:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 99,98% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (capaian kinerja sebesar 100,00%), telah ikut serta dalam Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 2 kali dalam satu tahun anggaran.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar **100,00%** terdiri dari:
  - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebesar 395,33 %, hal ini dikarenakan DPMPTSP telah menerbitkan sebanyak 43.486 dokumen melebihi target sebanyak 11.000 dokumen. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (capaian kinerja sebesar 100,00%), maksimal pada Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik selama 12 bulan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar **43,23%** terdiri dari:
  - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja sebesar 94,45% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (capaian kinerja sebesar 42,85%), tidak memenuhi target karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya dilakukan 3 kali. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.

- Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (capaian kinerja sebesar 38,46%), tidak memenuhi target karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan hanya dilakukan sebanyak 200 kali dalam satu tahun anggaran. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**, hal ini dikarenakan kegiatan Pemenuhan Data dan Informasi Penanaman Modal tetap dilaksanakan dengan tidak adanya dukungan anggaran. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 100,00% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (capaian kinerja sebesar 100,00%), hal ini dikarenakan DPMPTSP tetap mengolah dan mengkaji Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan tidak adanya dukungan dana atau pagu anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat enam Program yang mendukung Capaian pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah, maupun Sasaran Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024. Keenam program diatas antara lain: 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, 2) Program Promosi Penanaman Modal, 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, telah menunjang pencapaian kinerja, 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6) Program Pelayanan Penanaman Modal.

### **3.1.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya**

Beberapa pagu pada Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dialihkan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2024, hal ini guna mendukung Efisiensi Anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.7**

**Efisiensi Anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Banyuwangi  
Tahun 2024**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	0	-50.000.000
<b>2</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>199.991.200</b>	<b>199.991.200</b>	<b>0</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	199.991.200	199.991.200	0
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>51.916.400</b>	<b>19.516.400</b>	<b>-32.400.000</b>
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.916.400	19.516.400	-32.400.000
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>19.999.450</b>	<b>0</b>	<b>-19.999.450</b>
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.450	0	-19.999.450
<b>5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>8.135.069.078</b>	<b>8.334.063.078</b>	<b>198.994.000</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.019.700	12.645.300	-4.374.400
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.103.398.796	4.098.016.796	-5.382.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.433.597.100	2.308.645.600	-124.951.500
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.872.600	75.641.500	42.768.900
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.329.882	1.230.329.882	0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.851.000	608.784.000	290.933.000
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>726.968.000</b>	<b>780.368.000</b>	<b>53.400.000</b>
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	726.968.000	780.368.000	53.400.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.183.944.128</b>	<b>9.333.938.678</b>	<b>149.994.550</b>

Tabel 3.7 diatas merupakan tabel perbandingan anggaran sebelum dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Pada tabel tersebut diketahui terdapat program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu guna mendukung efisiensi anggaran. Program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 50.000.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 50.000.000 menjadi Rp 0. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 50.000.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 50.000.000 menjadi Rp 0. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dari aspek anggaran, waktu, maupun tenaga serta mendorong terciptanya iklim investasi. Jika dilihat dari segi anggaran, melalui kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, peluang potensi yang ada di daerah dapat dianalisis maka dengan adanya kegiatan tersebut dapat menyaring peluang investasi yang layak sehingga menghindari pemborosan sumber daya pada sektor yang kurang prospektif.
2. Program Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 32.400.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 51.916.400 menjadi Rp 19.516.400. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 32.400.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 51.916.400 menjadi Rp 19.516.400. Pada program ini, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten banyuwangi memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pelaksanaan penanaman modal, memberi edukasi regulasi penanaman modal terhadap para pelaku usaha, serta melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Dengan menerapkan kegiatan ini, maka dapat mengurangi potensi pelanggaran akibat ketidaktahuan regulasi yang ujungnya dapat mengefisiensikan biaya penegakan hukum dan koreksi administrasi.
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 19.999.450 yaitu dari anggaran sebesar Rp 19.999.450 menjadi Rp 0. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang mengalami perubahan

anggaran, yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 19.999.450 yaitu dari anggaran sebesar Rp 19.999.450 menjadi Rp 0. Melalui kegiatan ini, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten banyuwangi melakukan pembaruan data perizinan dan non perizinan secara berkala dengan adanya hal tersebut maka dapat terhindar dari penggunaan data usang yang bisa menyebabkan kekeliruan dan pemborosan anggaran

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 198.994.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 8.135.069.078 menjadi Rp 8.334.063.078. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, yaitu :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 4.374.400 yaitu dari anggaran sebesar Rp 17.019.700 menjadi Rp 12.645.300.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 5.382.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 4.103.398.796 menjadi Rp 4.098.016.796.
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 124.951.500 yaitu dari anggaran sebesar Rp 2.433.597.100 menjadi Rp 2.308.645.600.
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 42.768.900 yaitu dari anggaran sebesar Rp 32.872.600 menjadi Rp 75.641.500.
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 290.933.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 317.851.000 menjadi Rp 608.784.000.
5. Program Pelayanan Penanaman Modal mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 53.400.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 726.968.000 menjadi Rp 780.368.000. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 53.400.000 yaitu dari anggaran sebesar Rp 726.968.000 menjadi

Rp 780.368.000. Melalui kegiatan ini, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten banyuwangi mengintegrasikan layanan perizinan dan non perizinan dalam satu platform online. Dengan adanya platform tersebut memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan secara online sehingga mengurangi antrean fisik, mempercepat proses layanan, serta menghindari pemborosan sumber daya pada pelayanan yang tidak efektif.

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2024**

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah PAK	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>8.334.063.078</b>	<b>7.261.957.291</b>	<b>87,14%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.645.300</b>	<b>12.253.000</b>	<b>96,90%</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.992.700	6.847.900	97,93%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.652.600	5.405.100	95,62%	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.098.016.796</b>	<b>3.212.687.381</b>	<b>78,40%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.089.249.096	3.204.006.631	78,35%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.767.700	8.680.750	99,01%	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.308.645.600</b>	<b>2.246.960.779</b>	<b>97,33%</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	122.497.200	122.479.750	99,99%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.145.550	119.407.900	98,57%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	232.298.450	230.388.250	99,18%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.110.733.000	1.096.126.950	98,69%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.111.700	119.812.550	91,38%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.996.000	8.880.000	88,84%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.863.700	549.865.379	94,66%	
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75.641.500</b>	<b>74.605.600</b>	<b>98,63%</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.641.500	74.605.600	98,63%	
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.230.329.882</b>	<b>1.114.560.031</b>	<b>90,59%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.200.000	14.200.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.879.882	605.910.031	87,96%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.250.000	494.450.000	93,78%	

1.6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>608.784.000</b>	<b>600.890.500</b>	<b>98,70%</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.314.000	166.938.500	96,32%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.140.000	78.136.700	100,00%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.597.300	99,80%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.330.000	156.218.000	99,29%	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Program Prioritas
2.1	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Kegiatan Prioritas
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Sub Kegiatan Prioritas
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>199.991.200</b>	<b>199.949.100</b>	<b>99,98%</b>	
3.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>199.991.200</b>	<b>199.949.100</b>	<b>99,98%</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	199.991.200	199.949.100	99,98%	
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>780.368.000</b>	<b>778.232.500</b>	<b>99,73%</b>	
4.1	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>780.368.000</b>	<b>778.232.500</b>	<b>99,73%</b>	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	780.368.000	778.232.500	99,73%	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>19.516.400</b>	<b>13.464.500</b>	<b>68,99%</b>	
5.1	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>19.516.400</b>	<b>13.464.500</b>	<b>68,99%</b>	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	14.556.400	8.824.500	60,62%	
	Pengawasan Penanaman Modal	4.960.000	4.640.000	93,55%	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Program Prioritas
6.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Kegiatan Prioritas
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Pengalokasian Pagu Untuk Sub Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Realisasi Anggaran pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.253.603.391,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Jumlah Anggaran sebesar Rp. 9.333.938.678,- (Sembilan miliar tiga ratus

tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,89%. Adapun Capaian Kinerja Keuangan masing- masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara secara rinci sebagai berikut:

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar **87,14%** terdiri dari:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,90% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (capaian realisasi anggaran sebesar 97,93%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak tersedia pada penyedia. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan standar harga dan melihat ketersediaan barang pada penyedia.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (capaian realisasi anggaran sebesar 95,62%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak tersedia pada penyedia. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan standar harga dan melihat ketersediaan barang pada penyedia.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 78,40% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (capaian realisasi anggaran sebesar 78,35%) belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat promosi dan mutasi kerja ASN ke instansi lain, sehingga pencairan pagu berkurang cukup banyak. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN yang lebih matang, sesuai dengan ketentuan yang.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (capaian realisasi anggaran sebesar 99,01%) hampir maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak tersedia pada penyedia. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan standar harga dan melihat ketersediaan barang pada penyedia.
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,33% terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (capaian realisasi anggaran sebesar 99,99%) maksimal pada realisasi anggaran.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (capaian realisasi anggaran sebesar 98,57%) hampir maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak tersedia pada penyedia. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan standar harga dan melihat ketersediaan barang pada penyedia.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (capaian realisasi anggaran sebesar 99,18%) hampir maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak tersedia pada penyedia. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan standar harga dan melihat ketersediaan barang pada penyedia.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (capaian realisasi anggaran sebesar 98,69%) hampir maksimal pada realisasi anggaran karena terdapat rincian belanja yang tidak dicairkan seluruhnya yaitu bahan bakar minyak. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan kebutuhan barang yang lebih matang, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (capaian realisasi anggaran sebesar 91,38%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat beberapa item belanja tidak dibelanjakan karena kebijakan penggunaan sistem digital, sehingga pembelian bahan cetak dan kertas mengalami penurunan. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (capaian realisasi anggaran sebesar 88,84%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat penyesuaian harga pada surat kabar. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan pembelian barang yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (capaian realisasi anggaran sebesar 94,66%), belum maksimal realisasi anggaran karena tidak melakukan pencairan pada semua pagu pada perjalanan dinas, pencairan berdasarkan pada kegiatan baik perjalanan dinas dalam maupun luar daerah. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,63% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (capaian realisasi anggaran sebesar 98,63%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat barang yang tidak diproduksi lagi. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,59% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (capaian realisasi anggaran sebesar 100,00%) maksimal pada realisasi anggaran.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (capaian realisasi anggaran sebesar 87,96%), belum maksimal realisasi anggaran karena adanya cadangan anggaran untuk kenaikan tarif belanja tagihan air dan DPMPTSP mendapat tambahan anggaran belanja tagihan air saat PAK 2024. Realisasi sudah sesuai kebutuhan. Upaya perbaikan kinerja berupa

perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (capaian realisasi anggaran sebesar 93,78%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) yang diangkat menjadi PPPK, sehingga tidak dapat mencairkan pagu secara keseluruhan. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan belanja jasa THL yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,70% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (capaian realisasi anggaran sebesar 96,32%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat kesalahan penginputan Nomor Polisi Kendaraan DPMPTSP saat perangkat Kecamatan Songgon melakukan pembayaran pajak kendaraan. Sehingga anggaran belanja pembayaran pajak kendaraan DPMPTSP tidak terealisasi seluruhnya. Upaya perbaikan kinerja berupa tetap melakukan perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (capaian realisasi anggaran sebesar 100,00%), maksimal pada realisasi anggaran.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (capaian realisasi anggaran sebesar 99,80%), maksimal pada realisasi anggaran.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (capaian realisasi anggaran sebesar 99,29%), maksimal pada realisasi anggaran.
8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian realisasi anggaran sebesar **0,00%** terdiri dari:
- a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar 0,00% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (capaian realisasi anggaran sebesar 0,00%), Pengalokasian Pagu Untuk Program Prioritas.
9. Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian realisasi anggaran sebesar **99,98%** terdiri dari:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,98% terdiri dari:
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (capaian realisasi anggaran sebesar 99,98%), maksimal pada realisasi anggaran.
10. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian realisasi anggaran sebesar **99,73%** terdiri dari:
- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,73% terdiri dari:

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (capaian realisasi anggaran sebesar 99,73%), maksimal pada realisasi anggaran.
11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian realisasi anggaran sebesar **68,99%** terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar 68,99% terdiri dari:
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (capaian realisasi anggaran sebesar 60,62%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga penyerapan anggaran untuk beberapa rekening belanja lainnya tidak maksimal. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.
  - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (capaian realisasi anggaran sebesar 93,55%), belum maksimal realisasi anggaran karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga penyerapan anggaran untuk beberapa rekening belanja lainnya tidak maksimal. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.

12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dengan capaian realisasi anggaran sebesar **0,00%** terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran sebesar 0,00% terdiri dari:
  - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (capaian realisasi anggaran sebesar 0,00%), Pengalokasian Pagu Untuk Program Prioritas.

Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian realisasi anggaran mengalami penurunan, dari realisasi sebesar 91,89% menjadi 88,43% pada Tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal adalah dengan meningkatkan peran pejabat yang mengelola anggaran dan kegiatan dalam merencanakan kegiatan, memantau realisasi anggaran, dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

### **3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Penurunan Kinerja**

Berdasarkan capaian baik dari realisasi kinerja maupun realisasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwang Tahun 2024, terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan kinerja, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (capaian kinerja sebesar 94,15%), belum maksimal dikarenakan terdapat kebijakan penggunaan sistem digital dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga realisasi barang cetak dan penggandaan tidak maksimal.
2. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (capaian kinerja sebesar 0,00%), dikarenakan pengalihan anggaran pada perogram prioritas, sehingga tidak dapat merealisasikan kegiatan penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota sesuai target.
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (capaian kinerja sebesar 42,85%), tidak memenuhi target karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya dilakukan 3 kali.
4. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (capaian kinerja sebesar 38,46%), tidak memenuhi target karena terdapat Pengurangan Anggaran, sehingga Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan hanya dilakukan sebanyak 200 kali dalam satu tahun anggaran. Upaya perbaikan kinerja berupa perencanaan yang lebih matang, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.

Pada capaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30%. Adapun Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 94,54%. Adapun analisis penyebab kegagalan antara lain:

- 1) Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, dampak dari perubahan kebijakan internasional, serta tantangan di sektor infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai;
- 2) Belum sepenuhnya terintegrasi antara Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten dengan sistem Online Single Submission (OSS).

### 3.2.2 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan kinerja atau alternatif peningkatan kinerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan sub kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal adalah dengan perbaikan pada tahap perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dinas dan juga berpedoman pada kebijakan yang berlaku.

Dalam hal upaya perbaikan ataupun alternatif peningkatan kinerja pada Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global dan Tantangan Infrastruktur maka dilakukan Upaya:
  - a. Promosi Investasi Bertarget: Fokus pada sektor-sektor yang relatif tahan krisis seperti pertanian modern, pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif. Buat paket promosi sederhana (leaflet, video singkat) untuk menyasar investor lokal dan regional.
  - b. Kolaborasi dengan OPD Teknis: Dorong kerja sama lebih erat dengan dinas-dinas teknis seperti PUPR atau Bappeda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung investasi, walaupun dalam skala kecil dan bertahap.
  - c. Kampanye Kemudahan Berusaha: Adakan sosialisasi rutin tentang kemudahan dan insentif investasi, khususnya bagi UMKM, agar tetap ada aliran modal lokal yang tumbuh.
2. Integrasi Perda Tata Ruang dengan OSS dilakukan upaya:
  - a. Koordinasi Internal dan FGD: Adakan forum diskusi bersama Bappeda, Dinas PUPR, dan tim OSS Pusat/Provinsi untuk sinkronisasi data RDTR ke dalam sistem OSS secara bertahap.
  - b. Pemetaan Masalah Teknis OSS: Catat dan laporkan kendala-kendala input data RDTR dalam OSS untuk dibahas secara teknis dengan pusat/provinsi.
  - c. Penyusunan Panduan Internal: Buat SOP sederhana untuk staf pelayanan agar mampu menjelaskan kepada investor apabila ada ketidaksesuaian antara sistem OSS dan ketentuan daerah, serta cara menyiasatinya sementara waktu (misal: surat keterangan manual dari dinas terkait).

Upaya Perbaikan ataupun alternatif solusi juga dilakukan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat yang meliputi:

- 1) Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Unit Penyelenggaraan Pelayanan yang Mudah Diakses oleh Masyarakat atau Pemohon seperti di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pasar Pelayanan Publik (P3) di Kecamatan Genteng dan Rogojampi;
- 2) Peningkatan Program dan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Kabupaten melalui Aplikasi Pelayanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Peningkatan Program Digitalisasi Pelayanan Penanaman Modal melalui Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berupa kegiatan Implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital melalui Aplikasi Pelayanan Non-OSS yang terintegrasi dengan SuperApp (Smartkampung);
- 4) Peningkatan pelayanan perizinan dan perizinan melalui Mobil Pemburu Nomor Induk Berusaha Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) yang merupakan langkah Percepatan Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistematis Jemput Bola di Luar Jam Kerja dengan sasaran masyarakat di kerumunan (Pasar, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Aula Kantor) dan Melakukan Sosialisasi terkait Kebijakan Program Daerah dan Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta Persyaratan untuk Mendapatkan Legalitas Badan Usaha dan Rumah Kediaman;
- 5) Memberikan Toleransi Kemudahan Layanan Izin Tempat Praktek Dokter Mandiri, yakni Rekom Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD);
- 6) Mendorong Pemberian Kebijakan dan Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi Program Bedah Rumah.

### **3.2.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi**

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, selain capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan yang telah disajikan di atas diperlukan juga analisis efektivitas dan efisiensi sebagai gambaran apakah penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sesuai dengan apa yang direncanakan dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Efektif merupakan cara untuk mencapai tujuan tanpa mementingkan waktu asalkan tujuan tersebut dapat tercapai, sedang efisien merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai tujuan tersebut.

**Tabel 3.10**  
**Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024**

NO.	PERJANJIAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	4,00	-7,17	-179 ,30	Tidak Efektif
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,80	4,53	94,54	Tidak Efektif

Keterangan:  $\geq 100$  = Efektif dan  $< 100$  = Tidak Efektif;

Tabel pengukuran efektivitas kinerja di atas menunjukkan bahwa baik tujuan maupun sasaran strategis Perangkat Daerah belum mencapai target atau dinyatakan tidak efektif, menggambarkan bahwa capaian tersebut tidak jauh dari target yang ditetapkan sehingga bisa dikejar atau diperbaiki pada tahun berikutnya.

**Tabel 3.11**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024**

NO.	PERJANJIAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	EFISIENSI $\frac{(8 \times 7) - 9}{100} \times (8 \times 7)$	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah (Tujuan)	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	4,00	-7,17	-1,73	9.183.944.128,-	9.333.938.678,-	158,75%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Sasaran)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,80	4,53	0,94	9.183.944.128,-	9.333.938.678,-	-8,12%	Efisien

Keterangan: Batas Maksimal 20% dan Batas Minimal -20%

Berdasarkan tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 di atas diketahui bahwa :

- a. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah adalah sebesar 158,75 (Tidak Efisien)
- b. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah adalah sebesar -8,12% (Efisien)

### 3.2.3 Inovasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kemudahan berusaha di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi terus berinovasi melalui pengembangan berbagai program strategis yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun tiga inovasi unggulan yang telah dijalankan, antara lain:

- a. Antrean Online Digital melalui Aplikasi Smart Kampung Banyuwangi. DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi menghadirkan sistem antrean online berbasis digital yang terintegrasi dalam Aplikasi Smart Kampung Banyuwangi. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non-perizinan tanpa harus datang langsung dan menunggu lama di tempat pelayanan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pemesanan antrean secara daring (online), memilih jadwal layanan sesuai waktu yang diinginkan, serta memperoleh informasi status layanan secara real-time. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kerumunan, serta memberikan kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.
- b. Mobil Pemburu NIB (Nomor Induk Berusaha) Tepat untuk Masyarakat. Dalam mendukung percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga ke tingkat desa, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi meluncurkan inovasi Mobil Pemburu NIB. Layanan ini merupakan bentuk jemput bola yang mengedepankan pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung desa-desa untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengurusan NIB. Melalui mobil layanan ini, petugas DPMPTSP memberikan edukasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi penerbitan NIB secara langsung di lokasi, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan informasi. Inovasi ini menjadi solusi nyata dalam mendorong formalitas usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat desa secara inklusif.
- c. Rumah LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Rumah LKPM merupakan inovasi layanan konsultasi dan asistensi dalam penyusunan serta pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi para pelaku usaha di Kabupaten

Banyuwangi. Layanan ini hadir untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kendala atau kesulitan dalam menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui Rumah LKPM, DPMPTSP menyediakan tempat konsultasi khusus yang dilengkapi dengan petugas pendamping berkompeten guna memberikan solusi secara langsung atas berbagai permasalahan teknis yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pelaporan kegiatan penanaman modal. Inovasi ini mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan transparan di daerah.

Ketiga inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun Banyuwangi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

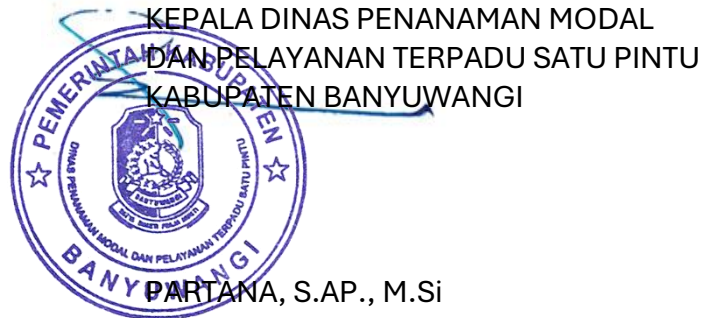
Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30% (Sangat Rendah : Skala Kriteria Penilaian) dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 94,54% (Baik Sekali : Skala Kriteria Penilaian);
2. Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Awal Tahun atau sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2024 sebesar Rp. 9.183.944.128,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 9.333.938.678,- atau ada tambahan anggaran sebesar Rp. 149.994.550,-;
3. Tingkat Efektif dan Efisien pada Capaian Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah dengan Indikator Laju Pertumbuhan Investasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar -179,30 (Tidak Efektif) dan sebesar 158,75% (Tidak Efisien) sedangkan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah sebesar 94,54 (Tidak Efektif) dan sebesar -8,12% (Efisien).
4. Secara internal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi melakukan penataan dan meningkatkan kompetensi SDM, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024, semoga bermanfaat bagi semua komponen yang berkontribusi

atas pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai pemicu untuk mencapai target kinerja di Tahun Anggaran berikutnya.

Banyuwangi, 12 Februari 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP., M.Si  
Pembina  
NIP 197201201994031004